



KotakPos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. RadenSaleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 522-6 / 606 / KPHL BB - 2019

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dimanfaatkan dan digunakan secara tidak optimal mengakibatkan kerusakan hutan;
 - b. bahwa untuk meminimalisir terjadinya kerusakan hutan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan perlu dilaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, melalui alokasi kegiatan dan pembiayaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 berupa Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

7. Keputusan Menteri ...

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Patroli Dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01172.025.5.2;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Patroli Dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.


KEDUA: Kerangka...

- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Patroli Dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman acuan kerja kegiatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Patroli Dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.00.04.2.00.04.01172.025.5.2.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 14 Februari 2019.

KEPALA DINAS



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.
6. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan di Padang.
8. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan TA. 2019 di Padang.
9. Peninggal.